



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;**

**Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; dan**

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

ARAH JAKSTRANAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstranas memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

b. penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Jakstranas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstranas sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. gubernur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi; dan

c. bupati . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota.
- (3) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur.
 - (4) Penyusunan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
 - (6) Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain berpedoman kepada Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
 - (7) Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Jakstranas

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstranas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstranas kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, Menteri bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstranas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstranas;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstranas yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara nasional.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstranas.
- (5) Terhadap laporan Jakstranas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstranas.

Bagian Ketiga
Jakstrada Provinsi

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada provinsi, gubernur bertugas:
- a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;

d. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah provinsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

Bagian Keempat
Jakstrada Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten kota, bupati/wali kota bertugas:

a. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(4) Capaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten/kota.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten/kota.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Jakstranas, Jakstrada provinsi, dan Jakstrada kabupaten/kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. gubernur wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku; dan
- b. bupati/wali kota wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 - 2025

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton) | 65,8 | 66,5 | 67,1 | 67,8 | 68,5 | 69,2 | 69,9 | 70,6 | 70,8 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton) | 9,89 (15%) | 12 (18%) | 13,4 (20%) | 14 (22%) | 16,4 (24%) | 17,99 (26%) | 18,9 (27%) | 19,7 (28%) | 20,9 (30%) |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (juta ton) | 47,3 (72%) | 48,5 (73 %) | 53,7 (80%) | 50,8 (75%) | 50,7 (74%) | 50,52 (73%) | 50,3 (72%) | 50,1 (71%) | 49,9 (70%) |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA TAHUN 2017 – 2025

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| 1. | Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kementeri-an Lingkung-an Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementeri-an Pekerjaan Umum dan Perumah-an Rakyat (PUPR), Badan Pengkajian dan | Kementerian Perindustrian (Kemenper-ind), Kementeri-an Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Standardisasi Nasional (BSN), pemerintah daerah provinsi (pemprov), dan pemerintah daerah | |

Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Penerapan Teknologi (BPPT) | kabupaten/ kota (pemkab/ kota) |
| | | | 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendagri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |

b) Pendaaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendagri, BPPT, BSN, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, BEKRAF, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | | |

a) Pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, BPPT, BSN, BEKRAF, pemprov, dan pemkab/kota |

c) Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | 4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota | |

b) Pendauran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: | | | | | | | | | | | | | |

a) Pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bapenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenperind, Kemendag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dan BPPT |
| | | | b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah | | | | | | | | | Pemprov dan pemkab/kota | DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota | |

Rumah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | |
| | | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah | Pertemuan/tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | KLHK | DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota |

d. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat | K/L | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | KLHK | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) |

b) Pemprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | b) Pemprov dan pemkab/kota | Daerah | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | KLHK | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | c) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | Daerah | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | KLHK | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: | | | | | | | | | | | | | |

a) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | a) kota metropolitan | Kota | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | KLHK | Kemendagri, Kemenper- ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | b) kota besar | Kota | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | KLHK | Kemendagri, Kemenper- ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/ kota |

c) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | c) kota sedang | Kota | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK | Kemendagri, Kemenper- ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | d) kota kecil | Kota | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | KLHK | Kemendagri, Kemenper- ind, Kemendag, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/ kota |

3) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota | Kabupaten/kota | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | KLHK | Pemprov dan pemkab/kota |
| | | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: 1) provinsi | Provinsi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenperind, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemprov, dan pemkab/kota |

2) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 2) kota metropolitan | Kota | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemenper- ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | 3) kota besar | Kota | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemenper- ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/kota |

4) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 4) kota sedang | Kota | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemenper- ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | 5) kota kecil | Kota | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemenper- ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota |

f. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) | 1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal | Kabupaten/kota | 27 | 28 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 40 | 40 | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), pemprov, dan pemkab/kota |

2) Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat | Kabupa- ten/kota | 25 | 30 | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pemkab/ kota | KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendik- bud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, dan pemprov |
| | | | 3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan | Kabupa- ten/kota | 25 | 30 | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pemkab/ kota | KLHK, Kemendagri, Kemendik- bud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, Kemenper- ind, Kementerian PUPR, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kemendag, Kemenpar, Kementerian Perhubung- an (Kemenhub), Kementerian BUMN, dan pemprov |
| | | | 4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi | Kabupa- ten/kota | 25 | 30 | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pemkab/ kota | KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendik- bud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, dan pemprov |

g. Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR | Unit/tahun | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK dan Kementerian KUKM | Kemenkeu, pemprov, pemkab/kota, dan pelaku usaha |
| | | | 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/tahun | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | KLHK | Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | 3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/tahun | - | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | KLHK | Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota |

4) Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Kelompok orang/bank sampah/tahun | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | KLHK dan Kementerian KUKM | Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota |

5) Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat | Kabupaten/kota /tahun | - | - | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | KLHK, Kementerian KUKM, dan Kemen-dagri | Kemenperind, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | 6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>) | Kawasan /tahun | - | - | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | KLHK | Kemenperind, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota |

h. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahun-an kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur | Produsen /tahun | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | KLHK dan Kemenper-ind | Kemendag, Kemendagri, pemprov, pemkab/ kota, dan pelaku usaha |

2) Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor peritel | Produsen /tahun | 75 | 125 | 175 | 225 | 300 | 250 | 450 | 500 | 500 | KLHK | Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada industri jasa makanan dan minuman | Produsen/ tahun | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | KLHK | Kemenperind, Kemendag, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | 4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/ tahun | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | KLHK dan Kemenper-ind | Kemendag, pemprov, pemkab/ kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman | |

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| 2. | Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a. Penyusunan NSPK | 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>) | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kemen-dagri | Kementerian PPN/Bap-penas, KLHK, Kementerian PUPR, dan Kemenkeu | |
| | | | 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kementeri-an PUPR | KLHK, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota | |

3) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kemen- dagri dan Kementeri- an PUPR | KLHK, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | 4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK, Kementeri- an PUPR, dan BPPT | Kemenperind, Kemenristek- Dikti, Kementerian ESDM, pemprov, dan pemkab/kota |

pemilahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

| NO. | KEBLAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) |

6) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |

c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kementeri-an PUPR dan KLHK | Kemendagri, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK dan Kementeri-an PUPR | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kementeri-an PUPR dan KLHK | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |

7) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |

c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kementeri-an PUPR dan KLHK | Kemendagri, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK dan Kementeri-an PUPR | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kementeri-an PUPR dan KLHK | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota | |

8) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |

c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kemenhub | KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK dan Kementeri an PUPR | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kementeri an PUPR dan KLHK | Kemendagri, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota |

9) Menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota |

c) Pengangkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 10)Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD) | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kementerian ESDM, Kemenperind, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kemendagri | |
| | | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: | | | | | | | | | | | | | |

a) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | a) Penyediaan lahan | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pemprov dan pemkab/kota | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
| | | | b) Pembinaan pemulung | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemensos, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenaga-kerjaan (Kemenaker), Kemenkeu, Kementerian KUKM, Kementerian PPN/ |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | Pemprov dan pemkab/kota | Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan KLHK | |

d) Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK, Kementeri- an PUPR, dan BPPT | Kemenristek Dikti |
| | | | 2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/kota | Unit | 20 | 25 | 20 | 36 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | Pemkab/ kota | Kementerian PUPR dan Kemendagri |
| | | | 3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota | Unit | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pemprov | DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bap- penas, Kementerian ESDM, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 41 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kemenkeu, dan pemkab/kota |
| | | | 4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kementeri-an PUPR | DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kemenkeu, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah | Pertemu-an/tahun | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | KLHK dan Kementeri-an PUPR | DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Kemendagri, pemprov, dan pemkab/kota |

d. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Pusat | K/L | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota |

b) pemprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | b) pemprov dan pemkab/kota | Daerah | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | c) DPRD kabupaten/kota | Daerah | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di: | | | | | | | | | | | | | |

a) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | a) kota metropolitan | Kota | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | b) kota besar | Kota | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | | c) kota sedang | Kota | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, Kemenperind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota |

d) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | d) kota kecil | Kota | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | KLHK dan Kementerian PUPR | Kemendagri, Kemen-perind, Kemendag, Kemendes PDTT, pemprov, dan pemkab/kota |
| | | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di: | | | | | | | | | | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -

| NO. | KEBLJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 1) provinsi | Provinsi | 5 | 5 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemen-perind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota | |
| | | | 2) kota metropolitan | Kota | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenper-ind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota | |

3) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 3) kota besar | Kota | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemen- perind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | 4) kota sedang | Kota | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemen- perind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota |

5) kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 5) kota kecil | Kota | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | KLHK | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemen- perind, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE | 1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kabupa- ten/kota | 25 | 30 | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | KLHK | Kemendagri, Kemendik- bud, Kementerian Agama, Kementeri- an Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, pemprov, dan pemkab/ kota |

2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat | Kabupa- ten/kota | 25 | 30 | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pemprov dan pembkab/ kota | KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendik- bud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, dan Kemendes PDTT |
| | | | 3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan | Kabupa- ten/kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pemprov dan pembkab/ kota | KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemendik- bud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, dan Kemensos |

4) Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat | Unit/ tahun | 2125 | 2725 | 3325 | 3535 | 3645 | 3755 | 3865 | 3975 | 4085 | KLHK dan pemkab/ kota | Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pelaku usaha |
| | | | b) Kawasan (TPS3R) | Kabupa- ten/kota | 72 | 90 | 72 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | Kementeri an PUPR, Kemen dagri, KLHK, dan pembkab/ kota | Kementerian PPN/Bap- penas, Kemenper- ind, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, dan Kementerian BUMN |

5) Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Kabupa-ten/kota | 25 | 30 | 35 | 35 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pemkab/kota | KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan pemprov | |

g. Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan | 1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir | Perusahaan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kementerian- an BUMN | Kementerian PPN/Bap-penas, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian PUPR |

b) Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>Intermediate Treatment Facilities</i> (ITF) | Perusahaan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kementerian BUMN | Kementerian PPN/Bappenas, KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan pelaku usaha |
| | | | 2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pelaku usaha | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK | Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kemensos, Kemenperind, dan Kementerian PUPR |

h. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | h. Penguatan penegakan hukum | 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | KLHK dan pemkab/kota | Kemenkum HAM, Kemenhub, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan |

2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kabupaten/kota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK dan pemkab/kota | KemenkumHAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan |
| | | i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui | Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan | Kabupaten/kota/tahun | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 38 | 38 | Kemendagri | KLHK, Kementerian PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/kota |

kemitraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah | pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | |
| | | j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna | 1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kabupaten/kota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KLHK, Kementerian PUPR, dan BPPT | Kementerian Kominfo, Kemendagri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pemprov, dan pemkab/kota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BPPT, KLHK, dan Kementerian PUPR | Kemendikbud, Kemenristek Dikti, LIPI, pemprov, dan pemkab/ kota |
| | | | 3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui: | | | | | | | | | | | | |

a) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal | Kota | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | KLHK, Kementeri- an ESDM, dan Kemen- dagri | DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkot Bandung, Pemkot Tangerang, Pemkot Semarang, Pemkot Surakarta, Pemkot Surabaya, Pemkot |

Makassar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Makassar, Pemkot Denpasar, dan Kementerian PUPR |
| | | | b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA | Kabupa- ten/kota | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | KLHK, Kementeri- an PUPR, dan Kementeri- an ESDM | DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov Jawa Barat, Kota Bekasi, dan Kemendagri |
| | | | c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF | Kabupa- ten/kota | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK, Kementeri- an PUPR dan Kemen- perind | DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Cilacap, Kemendagri, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha industri semen |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan | Kota | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Kementeri-an ESDM, KLHK, dan Kementeri-an PUPR | Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappe-nas, Kemenristek Dikti, Kemendagri, BPPT, pemprov, dan pemkab/kota | |
| | | k. Penerapan dan pengembang-an sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | KLHK | Kemenperind, Kementerian PPN/Bap-penas, Kemenkeu, Kemendag, pemprov, dan pemkab/kota | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat | Kabupaten/kota | - | - | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | KLHK, Kementerian PUPR, Kemendagri, dan pemprov | Kemenperind, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, Kementerian KUKM, Kemendes PDTT, dan pemkab/kota |
| | | | 3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat | Kabupaten/kota | - | - | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | KLHK, Kemendagri, dan pemprov | Pemkab/kota |

4) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 62 -

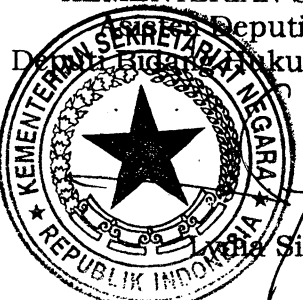
| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan | Kawasan | - | 30 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | KLHK, Kemenda- gri, Kementeri- an PUPR, pemprov, dan pembkab/ kota | Kemenperind, Kementerian PPN/Bap- penas, Kemenkeu, Kemendag, dan Kementerian KUKM |

5) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 63 -

| NO. | KEBLJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | 5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan | Kawasan | - | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | KLHK, pemprov, dan pemkab/kota | Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO